



► KINERJA PEMERINTAH

Pemkab Incar Opini WTP ke-10

WONOSARI—Pemkab Gunungkidul berkomitmen memperbaiki catatan-catatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto se usai menggelar *Exit Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD* di Ruang Rapat Handayani, Setda Gunungkidul, Rabu (9/4). "Ini menjadi masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah," kata Joko, Rabu.

Dia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di 2024. Dengan adanya perbaikan, diharapkan Kabupaten Gunungkidul dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya dari BPK RI secara beruntun.

Joko mengakui ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, temuan yang disampaikan BPK antara lain ketidaktertiban dalam penyelenggaraan reklame, pengelolaan PBB-P2 serta retribusi tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan persampahan yang dinilai belum optimal.

Selain itu, juga ada masalah pertanggungjawaban belanja kegiatan reses DPRD yang belum sesuai ketentuan. "Ada juga temuan tentang permasalahan pada belanja tagihan listrik PJU, penganggaran BOP PAUD, hingga penggantian penerima bansos yang belum ditetapkan dengan SK Bupati," kata Joko.

Joko menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut telah dibahas bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan telah dituangkan dalam tanggapan resmi melalui Inspektorat Daerah.

Kepala Subauditorat BPK Perwakilan DIY, Ridwan Sani M, mengatakan pemeriksaan LKPD Gunungkidul telah berlangsung selama 30 hari. Ada tujuh pokok pemeriksaan yang menjadi fokus, meliputi aspek kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengungkapan informasi keuangan yang akurat.

Menurut dia, tim audit telah menyampaikan konsep temuan, dan hasil akhirnya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan diserahkan secara resmi pada 16 April 2025. Total ada 17 temuan yang akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. (David Kurniawan)